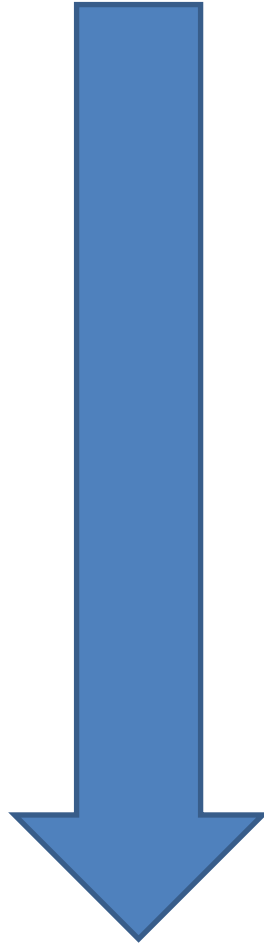


**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP TAHUN 2022**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG**

**Jalan surohadikusumo no 1
PEMALANG**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2022 disusun berdasarkan Pejanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran atas tingkat pencapaian perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan hingga di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2022, baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang ini, dapat memberikan manfaat yang optimal.

Pemalang, Februari 2023

Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG



NIP. 19680825 199303 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Adapun ringkasan prestasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang dicapai di tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

- a) Sasaran 1 : Digitalisasi Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Pemalang
Indikator : Indeks SPBE

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada tahun 2022 menargetkan nilai indeks SPBE yaitu sebesar 3,35, adapun realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar 2,23. Nilai Indeks SPBE pada tahun 2022 mengalami penurunan nilai sebesar 1,12 yang disebabkan oleh salah satu domain SPBE yaitu domain 3 manajemen SPBE dengan aspek penilaian yaitu Penerapan Manajemen SPBE dan audit TIK mendapatkan nilai kurang yaitu 1,00, sehingga mempengaruhi nilai total SPBE. Berdasarkan hal tersebut capaian indikator nilai indeks SPBE untuk tahun 2022 adalah sebesar 66,67%.

- b) Sasaran 2 : Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK
Indikator : Persentase Network Terintegrasi

Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan 78% untuk indikator Persentase Network Terintegrasi. Adapun realisasinya adalah sebesar 78%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Persentase Network Terintegrasi untuk tahun 2022 sebesar 100%.

- c) Sasaran 3 : Meningkatnya keamanan informasi untuk mendukung SPBE
Indikator : Tingkat/Indeks kematangan keamanan informasi (KAMI)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan Tingkat/Indeks kematangan keamanan informasi (KAMI) sebesar 2,3 pada tahun 2022, adapun realisasi Tingkat/Indeks kematangan informasi (KAMI) tahun 2022 adalah sebesar 2. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Tingkat/Indeks kematangan keamanan informasi (KAMI) tahun 2022 adalah sebesar 89%.

- d) Sasaran 4 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
Indikator : Indeks/ Nilai Keterbukaan Informasi Publik
Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan nilai 76 untuk indikator Indeks/ Nilai Keterbukaan Informasi Publik, adapun realisasi adalah sebesar 74. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Indeks/ Nilai Keterbukaan Informasi Publik untuk tahun 2022 adalah sebesar 97,37%.
- e) Sasaran 5 : Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektor
Indikator : Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektor yang berkualitas.
Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektor yang berkualitas sebesar 2%, adapun capaian pada tahun 2022 adalah sebesar 2%, maka capaian untuk indikator sasaran Persentase Ketersediaan data Statistik Sektor yang berkualitas tahun 2022 adalah sebesar 100%.
- f) Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik
Indikator : Persentase Penduduk yang terpapar Informasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan Persentase Penduduk yang terpapar Informasi Publik adalah sebesar 35% . Adapun realisasi yang dicapai adalah sebesar 35% Berdasarkan hal tersebut, maka capaian untuk Persentase Penduduk yang terpapar Informasi Publik tahun 2022 adalah sebesar 100%.
- g) Sasaran 7 : Peningkatan kualitas layanan informasi publik
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Komunikasi dan Informatika
Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan indeks/nilai Keterbukaan Informasi Publik sebesar 77,5 %. Adapun realisasinya adalah sebesar 76,48%, berdasarkan hal tersebut, maka capaian persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Komunikasi dan Informatika tahun 2022 adalah sebesar 96,75%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang untuk tahun-tahun selanjutnya. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	10
BAB 1 PENDAHULUAN	11
A. Gambaran Umum	12
i. Struktur Organisasi	12
ii. Tugas Pokok dan Fungsi	12
B. Isu Strategis	13
C. Keuangan	14
BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	15
A. Perencanaan Strategis	15
i. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	16
ii. Tugas Pokok dan Fungsi	22
B. Perjanjian Kinerja	32
C. Rencana Anggaran	34
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. Capaian Kinerja Organisasi	40
B. Akuntabilitas Anggaran	67
i. Realisasi Anggaran	67
ii. Analisis Efisiensi Sumber Daya	69
C. Inovasi	
BAB 4 PENUTUP	71
LAMPIRAN	

BAB 1

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2022 diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
2. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas,
- b) Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Subbagian Bina Program dan Keuangan,
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian,
- c) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :
 - 1. Seksi Informasi Publik,
 - 2. Seksi Komunikasi Publik,
- d) Bidang Penyelenggaraan E-Government terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur E-Government,
 - 2. Seksi Pengelolaan aplikasi E-Government,
- a) Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik terdiri dari:
 - 1. Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian,
 - 2. Seksi Statistik,

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- d. administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun

lingkungan internal. Isu strategis yang dapat diidentifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Belum meratanya akses masyarakat terhadap informasi;
 - b. Masih kurangnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika;
 - c. Belum meratanya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat terhadap teknologi informasi;
 - d. Belum terintegrasinya data sistem elektronik Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 - e. Belum terintegrasinya pengelolaan aplikasi di lingkungan SKPD/OPD Pemerintah Kabupaten Pemalang.
2. Urusan Persandian
 - a. Masih kurangnya kesadaran keamanan informasi Pejabat Negara dan aparatur Negara;
 - b. Adanya kerawanan dan ancaman perusakan sistem komunikasi elektronik, aplikasi server dan data center;
 - c. Adanya kerawanan dan ancaman keamanan jaringan komunikasi pejabat Negara dan OPD Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 - d. Terbatasnya fasilitas peralatan persandian.
3. Urusan Statistik
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat arti pentingnya data;
 - b. Terbatasnya/sulitnya akses data pembangunan;
 - c. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data statistik sektoral.

F. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada tahun 2022 berasal dari Dana Alolasi Umum dan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).

Pada tahun anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi anggaran penetapan sebesar Rp 16.554.900.000 dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp. 5.544.372.000, belanja barang dan jasa sebesar Rp.10.723.398.000 dan belanja hibah Rp. 50.000.000 serta belanja modal sebesar Rp. 237.130.000, yang diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan pendukung. Pada triwulan pertama tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 466.000.000,00 yaitu berasal dari Dana DBHCHT yang digunakan pada belanja barang dan jasa, sehingga anggaran pergeseran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 17.020.900.000,00 dan melalui mekanisme perubahan APBD 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp.1.764.943.000 sehingga anggaran perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menjadi Rp. 18.321.483.000. Adapun anggaran tersebut terbagi menjadi belanja operasi dan belanja modal, dimana belanja operasi terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 5.380.242.000, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 12.303.987.000 dan belanja hibah sebesar Rp. 50.000.000. Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 470.064.000, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 107.100.000, belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp.10.450.000. Secara keseluruhan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang digunakan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari 3 program, 9 kegiatan dan 46 sub kegiatan; Urusan Pemerintahan Bidang Statistik terdiri 1 program, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan; Urusan Pemerintahan Bidang Persandian terdiri dari 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.

G. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2021

Rekomendasi atas LHE SAKIP Tahun 2021 yaitu :

1. Menetapkan pedoman teknis perencanaan kinerja beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) nya.
2. Menetapkan pedoman teknis pengumpulan data dan pengukuran kinerja yang didalamnya terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar penyesuaian strategi dan penyesuaian anggaran serta melaksanakan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja.
3. Laporan kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja) dan penyajian informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
4. Agar menetapkan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang sesuai standar pada seluruh unit kerja.

Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2021 yaitu :

1. Telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) perencanaan kinerja dengan Nomor SOP : 067/49/1/SOP.DISKOMINFO/2019 tanggal 10 Juni 2019.
2. Telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.
3. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja kabupaten/kota di Jawa Tengah, yaitu pada penilaian SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Tahun 2022. Adapun perbandingan realisasi kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.1

INDEKS SPBE KAB/KOTA SE-JATENG TH 2022

NO	KAB/KOTA	ANGKA INDEKS	KETERANGAN(EVAL KEMENPAN RB/PENILAIAN MANDIRI (self assessment))
1.	Prov. Jawa Tengah	3.98	self assessment
2.	Kab. Banjarnegara	2.86	-
3.	Kab. Banyumas	3.6	self assesment
4.	Kab. Batang	-	-
5.	Kab. Blora	3,35	self assesment
6.	Kab. Boyolali	-	-
7.	Kab. Brebes	2,71	self Assesment
8.	Kab. Cilacap	3.29	Self Assesment
9.	Kab. Demak	3,19	Evaluasi SPBE Kementrian PAN RB 2021
10.	Kab. Grobogan	3,37	evaluasi SPBE kementerian PAN 2022
11.	Kab. Jepara	3,14	evaluasi SPBE kementerian PAN 2022
12.	Kab. Karanganyar	3,32	Evaluasi SPBE Kemenpan RB 2022
13.	Kab. Kebumen	3,44	Evaluasi SPBE Kemenpan RB 2022
14.	Kab. Kendal	-	-
15.	Kab. Klaten	2.74	Eval Kemenpan RB Tahun 2021. tahun 2022 tidak mengikuti penilaian.
16.	Kab. Kudus	3,38	Evaluasi Kemenpan RB tahun 2022
17.	Kab. Magelang	-	-
18.	Kab. Pati	2,75	Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2021, Tahun 2022 tidak mengikuti penilaian.
19.	Kab. Pekalongan	3.16	Self Assesment
20.	Kab. Pemalang	2,23	Pemantauan SPBE Kemenpan RB Tahun 2022

INDEKS SPBE KAB/KOTA SE-JATENG TH 2022

NO	KAB/KOTA	ANGKA INDEKS	KETERANGAN(EVAL KEMENPAN RB/PENILAIAN MANDIRI (self assessment))
21.	Kab. Purbalingga	-	-
22.	Kab. Purworejo	-	-
23.	Kab. Rembang	-	-
24.	Kab. Semarang	-	-
25.	Kab. Sragen	3,12	Evaluasi SPBE Kementerian PAN 2022
26.	Kab. Sukoharjo	-	-
27.	Kab. Tegal	3,1	Evaluasi SPBE Kementerian PAN 2022
28.	Kab. Temanggung	-	-
29.	Kab. Wonogiri	3,34	Evaluasi SPBE KemenPAN RB Tahun 2022
30.	Kab. Wonosobo	2,90	Evaluasi KemenPANRB
31.	Kota Semarang	4,7	Self Assesment
32.	Kota Surakarta	3,75	Evaluasi SPBE KemenPAN RB Tahun 2022
33.	Kota Tegal	3,05	Evaluasi SPBE KemenPAN RB Tahun 2022
34.	Kota Pekalongan	2,82	Evaluasi SPBE KemenPAN RB Tahun 2021, Tahun 2022 tidak mengikuti penilaian
35.	Kota Magelang	3,00	Self Assesment
36.	Kota Salatiga	-	-

sumber : <https://bit.ly/INDEKSSPBEKABKOSEJATENGTH2022>

Berdasarkan data di atas maka nilai indeks SPBE Kabupaten Pemalang Tahun 2022 adalah 2,23 dan menduduki peringkat terakhir yaitu peringkat 24 dari 24 kabupaten/kota yang telah melaksanakan penilaian indeks SPBE. Nilai tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2021, adapun nilai indeks SPBE Diskominfo Kabupaten Pemalang tahun 2021 yaitu 2,49. Nilai tersebut diperoleh dengan penilaian yang dilakukan secara *Self Assessment*.

4. Pedoman teknis dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan secara berjenjang yaitu dengan format Nota Dinas dari bawahan ke atasan. Adapun contoh pelaksanaan evaluasi dapat disajikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOTA DINAS

Kepada Yth : Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
Dari : Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
Tanggal : 30 Desember 2022
Nomor : 051 / 2022 / Diskominfo
Perihal : Laporan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan e-Government Tahun 2022

Dengan hormat kami laporkan, Kegiatan Bidang Penyelenggaraan e-Government Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Reguler

- Memasang akses internet publik dan OPD yang terkoneksi jaringan internet dan intranet (67 titik yang terdiri dari OPD dan Area Hotspot)
- Memasang Peralatan jaringan internet desa dalam mendukung program DEWI yaitu Desa Surajaya (wisata Wipas), Desa Gongseng (wisata Gunung Gajah), Desa Sikasur (wisata Curug Bengkawah dan Telaga Silating), Desa Banyumudal (wisata Bukit Gambangan), Desa Nyalembeng (wisata Tangkeban)
- Pemeliharaan jaringan komputer (12 bulan)
- Terpeliharanya Server (Revitalisasi Server yaitu melakukan instalasi dan konfigurasi di hardware server agar dapat menjalankan sistem HCI(Hyper-converged infrastructure) untuk dapat memaksimalkan pemanfaatan hardware server dengan metode virtualisasi)
- Terpenuhinya Mesin Server (1 Unit utk BKD)
- dokumen tata kelola dan monev SPBE (Manajemen Perubahan SPBE) 1 Dokumen
- Terpeliharanya Genset (12 Bulan)
- Pengembangan Aplikasi Sidekem
- Dokumen penguatan smart city (Revisi Masterplan Smartcity)
- Pelatihan Star Up Digital (KOMUNITAS PEMUDA SADAR DIGITAL)
- Pembangunan 2 tower (Desa Gongseng dan Desa Mendelem)

2. Blank Spot

- Koordinasi dengan Kementerian Kominfo dan Kemeko Polhukam (Deputi VII yang membidangi Kominfo dan Aparatur) untuk mendorong operator telekomunikasi seluler agar menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan operator seluler di desa-desa area blankspot;
- Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu direktur Pengendalian dalam rangka monitoring

pengecekan oleh direktur Pengendalian Kominfo dari 17 Desa yang diduga blankspot di Kabupaten Pemalang ada 4 Desa yang dinyatakan blankspot di Kabupaten Pemalang yaitu Bodas, Gunungbatu, Jurangmangu dan Gunungsari;

- Oktober 2022 pembangunan BTS dari Kemenkominfo di 4 Desa Bodas, Gunungbatu, Jurangmangu dan Gunungsari.
- Sampai Desember tahun 2022 sudah tidak ada desa blankspot dan tinggal beberapa arca mengalami blankspot parsial.

3. Bantuan Internet Kementerian

- Memberikan bantuan stimulus langganan internet pembayaran gratis selama 6 bulan untuk UMKM dan fasilitas umum, bantuan dari Direktorat Pengembangan Pita Lebar Kementerian Kominfo di Desa Pagenteran (Pulosari) 80 titik (UMKM 75 titik + Fasum 5 titik), Desa Gambuhan (Pulosari) 68 titik (UMKM 63 titik + Fasum 5 titik), dan Desa Kebon Gede (Bantarbolang) 65 titik (UMKM 61 titik + Fasum 4 titik).

4. Bantuan Internet Provinsi

- Dinas Komunikasi Provinsi Jateng Menyediakan koneksi internet gratis sebesar 30Mbps selama 1 tahun di kantor Desa Parunggalih (Bodeh), Mendelem (Belik), Majalangu (Watukumpul), dan Mandiraja (Moga).

5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kabupaten Pemalang tahun 2022 dengan indeks 2,23 (cukup).
- Indeks SPBE tahun 2022 turun di domain Manajemen SPBE yaitu Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK.
- Penurunan nilai tersebut dikarenakan dalam masa pandemi covid sehingga pemantauan SPBE tidak optimal, teridentifikasi pada saat evaluasi pemenuhan portofolio proses digitalisasi di OPD tidak bisa dipenuhi.

6. Smart City

- Mengikuti *Penilaian* Evaluasi dalam Rangka Program Gerakan Menuju *Smart City* 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu juga telah menyusun Revisi Masterplan Smarcity.

Demikian untuk menjadi periksa dan selanjutnya mohon petunjuk.

Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government



EDI SUTRIYONO, SE, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19730321 200501 1 007

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan *cascade* kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapasitas tata kelola Pemerintahan yang didukung oleh program dan kegiatan sesuai urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mendukung Misi ke 2 (dua) yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dan bersih; serta Misi yang ke 4 (empat) yaitu Mewujudkan keterpaduan Pembangunan Perdesaan dan perkotaan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026 .

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	TARGET KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)					
Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Pemalang	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK	Indeks komposit SPBE : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan Arsitektur SPBE, Kepemilikan Peta Rencana SPBE, pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE, penerapan Manajemen Layanan SPBE, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik. 	3,35	3,36	3,37	3,38	3,4
		Persentase Network Terintegrasi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah network perangkat daerah dan layanan public yang terintegrasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perangkat daerah dan layanan publik 	78	82	88	90	90
	Meningkatnya keamanan informasi untuk mendukung SPBE	Tingkat/Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dilihat dari Indeks KAMI. 	2,3	2,4	2,5	3	3
Peningkatan kualitas layanan informasi publik		Indeks/nilai Keterbukaan Informasi Publik Pengamanan Informasi (SMPI) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks/nilai yang diberikan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi 	78	79	80	80	80

	Meningkatnya ketersediaan data statistic sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah data statistik sektoral yang berkualitas sesuai standar dibandingkan dengan jumlah seluruh data statistic sektoral 	2	4	5	8	8
	Meningkatnya kualitas Layanan Informasi dan komunikasi Publik	Persentase Penduduk yang terpapar informasi publik : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk yang terpapar informasi publik dibandingkan dengan jumlah penduduk 	35	45	55	65	65

Tabel 2.2

Tujuan, sasaran dan Indikator beserta program Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Satuan	Target Tahun 2021	Nama Program	Indikator program	Target Kinerja program Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LKjIP (SAKIP PD)	Nilai	B (61)	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program peningkatan Kualitas Aparatur 4. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 5. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.Tersedianya pelayanan administrtasi perkantoran 2.Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 3.Meningkatnya kualitas aparatur 4.Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaranSKPD 5.Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan	100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.	- Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persen	100%	Program Penguatan Kelembagaan dalam Komunikasi dan Informasi Daerah Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	Cakupan pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi masyarakat di Kabupaten Pemalang	14 kelompok
		- Tingkat pemenuhan informasi publik pada website Pemalangkab.go.id	Persen	100%		Prosentase Website OPD yang aktif update data	100%
		- Pemeringkatan keterbukaan Infomasi Publik	Peringkat	12		Prosentase OPD yang memiliki Website	100%
	Memperkuat kualitas Aparat Komunikasi Informatika.	- Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika	Persen	100%	Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika	Prosentase SKPD yang telah memiliki website	100%
						Prosentase ASN yang trampil di bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika	100%
	Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik	- Rasio berita positif dan negatif di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang	Persen	90:10	Program kerjasama informasi dengan media massa	- Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah , radio dan televisi	4 kali

						- Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui baru (on line)	4 kali
					Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	- Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional	1 kali
						- Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal	1 kali
						- Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang	3 kali
						Prosentase OPD yang memiliki Website	100%
						Meningkatnya kualitas informasi melalui media cetak dan elektronik	80%

	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi literasi media 	Kelompok	14	Program Penguatan Kelembagaan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi daerah	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Kabupaten Pemalang	14 kelompok
Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik	Meningkatnya Layanan Telekomunikasi dan Informatika.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Data Center dan NOC dengan berstandar - Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks PEGI) - Pemenuhan Standar Manajemen Pengamanan Informasi 	Persen	100	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		100%
			Nilai	3	Program Pengembangan Persandian/Informasi Daerah	Prosentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	100%
	Ketersediaan Sistem dan Data Statistik Terintegrasi	Tersedianya Sistem dan Data Statistik Terintegrasi	Persen	100%	Program Pengembangan Data/Statistik/Informasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen Kabupaten dalam angka - Jumlah dokumen kecamatan dalam angka 	<p>100%</p> <p>100%</p>

						- Jumlah dokumen PDRB kecamatan	100%
						- Jumlah dokumen Indeks Harga konsumen dan Laju Inflasi Kabupaten pemalang	100%
						- Jumlah dokumen NTP Kabupaten pemalang	100%
						- Jumlah dokumen indikator penting pembangunan daerah kabupaten pemalang	100%

C. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 2.3

Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencana mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah.	Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta penyusunan berbagai laporan kinerja sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan
2	Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik	- Pemanfatan TIK dalam kegiatan pelayanan publik secara transparan, cepat dan handal.	<ul style="list-style-type: none"> - Restrukturasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu di setiap OPD. - Meningkatkan peran PPID dalam menghimpun dan mengelola data - Menyusun SOP Standar Layanan Informasi Publik. - Menyediakan sarana informasi publik. - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan informasi publik. - Menyediakan konten layanan informasi publik. - Membuka layanan partisipasi, aspirasi, dan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

				- Pengembangan layanan informasi.
		Meningkatnya kualitas Aparatur di bidang Komunikasi Informatika	Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.	- Meningkatkan keahlian dan keterampilan Aparatur Sipil Negara di setiap SKPD/OPD di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan prima
		Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pematang di Mata Publik	Optimalisasi dan intensifikasi pemanfaatan media informasi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Meningkatkan kerjasama informasi dengan media massa Meningkatkan kualitas media milik pemerintah daerah Penguatan literasi media untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat dalam memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi	Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi untuk diseminasi program pembangunan, penyediaan database profil wilayah dan meningkatkan pelayanan publik.	Penguatan literasi media untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat dalam memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya Pemberdayaan masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
2	Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik	Meningkatnya Layanan Telekomunikasi dan Informatika	Mengembangkan sarana dan prasarana TIK untuk mewujudkan data terpadu	- Membangun data center dan NOC berstandar. - Pengembangan jaringan FO - Fasilitasi pemerintah kepada masyarakat untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi - Menyusun standarisasi perangkat lunak dan perangkat keras - Menyusun standar basis data-

				<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun mekanisme interoperabilitas antar data.
				<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan server basis data dan aplikasi
				<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan aplikasi baik yang berbasis web maupun yang berbasis mobile
				<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan tuning (optimalisasi) aplikasi dan basis data untuk mempercepat aksesibilitas
				<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan layanan informasi dan aspirasi publik.
				<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan dan memelihara data center
		Ketersediaan Data Statistik terintegrasi	Mengoptimalkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dan penguatan statistik sektoral
				<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan data yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat

D. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (Perubahan)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Jumlah
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik.	Indeks/ Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	76
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Penduduk yang terpapar Informasi Publik	%	35
3	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Pemalang	Indeks SPBE	Indeks	3,35
4	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK	Persentase Network Terintegrasi	%	78
5	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang berkualitas	%	2
6	Meningkatnya Keamanan Informasi untuk mendukung SPBE	Tingkat/ Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	2,3
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Komunikasi dan Informatika	Indeks	77,5

E. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Pada tahun anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi anggaran penetapan sebesar Rp 16.554.900.000 dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp. 5.544.372.000, belanja barang dan jasa sebesar Rp.10.723.398.000 dan belanja hibah Rp. 50.000.000 serta belanja modal sebesar Rp. 237.130.000, yang diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan pendukung. Pada triwulan pertama tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 466.000.000,00 yaitu berasal dari Dana DBHCHT yang digunakan pada belanja barang dan jasa, sehingga anggaran pergeseran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 17.020.900.000,00 dan melalui mekanisme perubahan APBD 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp.1.764.943.000 sehingga anggaran perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menjadi Rp. 18.321.483.000. Adapun anggaran tersebut terbagi menjadi belanja operasi dan belanja modal, dimana belanja operasi terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 5.380.242.000, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 12.303.987.000 dan belanja hibah sebesar Rp. 50.000.000. sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 470.064.000, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 107.100.000, belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp.10.450.000. Secara keseluruhan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang digunakan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari 3 program, 9 kegiatan dan 46 sub kegiatan; Urusan Pemerintahan Bidang Statistik terdiri 1 program, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan; Urusan Pemerintahan Bidang Persandian terdiri dari 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju *good governance* sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

B. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk Capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-rata Data Kelompok” dengan rumus hitungan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sasaran :

$$= \frac{\text{Jumlah indikator tiap sasaran} \times \text{nilai mean tiap sasaran}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Adapun dalam penyusunan laporan ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 91 %	Sangat Baik	
2.	76 - 90 %	Tinggi	
3.	66 - 75 %	Sedang	
4.	51 - 65 %	Rendah	
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah	

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mengemban amanah atas pencapaian program prioritas Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Pemalang 2021-2026. Misi yang ke 2 (dua) yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dan bersih.

D. Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Selanjutnya, IKU tersebut menjadi kerangka acuan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kinerjanya guna menilai sejauh mana sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sebagaimana dalam lampiran. Sedangkan masing-masing indikator tersebut dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1**Capaian Kinerja atas Perjanjian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD (2026)	KINERJA s/d 2022 (%)
			TARGET	REALISASI	KINERJA (%)		
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Indeks/ Nilai Keterbukaan Informasi Publik	76	74	97,37	80,2	97,37%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan komunikasi Publik	Persentase Penduduk yang terpapar Informasi Publik	35	35	100	65	100%
3.	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintah Kabupaten	Indeks SPBE	3,35	2,23	66,67	3,4	66,67%
4.	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK	Persentase Network Terintegrasi	78	78	100	90	100%
5.	Meningkatnya Ketersediaan Data statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data statistik Sektoral yang berkualitas	2	2	100	8	100%
6.	Meningkatnya Keamanan Informasi untuk mendukung SPBE	Tingkat/ Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	2,3	2	86	3	86%
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Komunikasi dan Informatika	77,5	76,48	96,75	100	96,75%

E. Pengukuran Kinerja Indikator SDGiS

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan *Sustainable Development Goals*(SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terdiri dari 4 target indikator yaitu:

a. Prosentase penduduk terlayani mobile broadband (terlayani)

Definisi Operasional : Jumlah penduduk terlayani mobile broadband dibandingkan jumlah seluruh penduduk

Pada tahun 2022, ditargetkan sebesar 95 % dan terealisasi sebesar 93,5% sehingga capaian kinerja untuk indikator tersebut di atas sebesar 98 %

b. Proporsi individu yang menggunakan internet

Definisi Operasional: Jumlah penduduk yang menggunakan internet dibandingkan jumlah seluruh penduduk

Pada tahun 2022, ditargetkan sebesar 55 % dan terealisasi sebesar 53,5 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 97 %

c. Persentase SKPD telah menyusun peraturan layanan informasi publik

Definisi Operasional : Jumlah SKPD yang menyusun peraturan Layanan Informasi Publik dibandingkan jumlah seluruh SKPD

Pada tahun 2022, ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 %.

d. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi atau adjudikasi non litigasi

Definisi Operasional: Jumlah sengketa informasi yang selesai dibandingkan jumlah seluruh sengketa informasi.

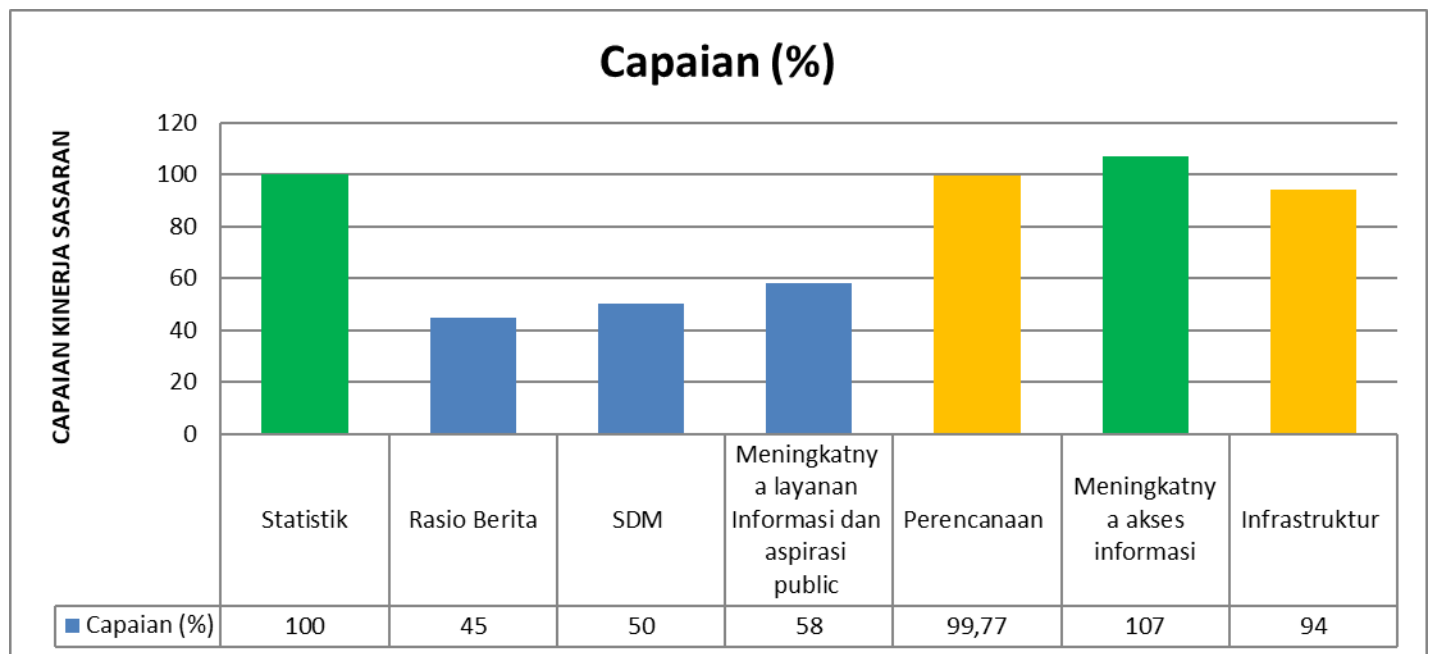
Pada tahun 2022, ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 %.

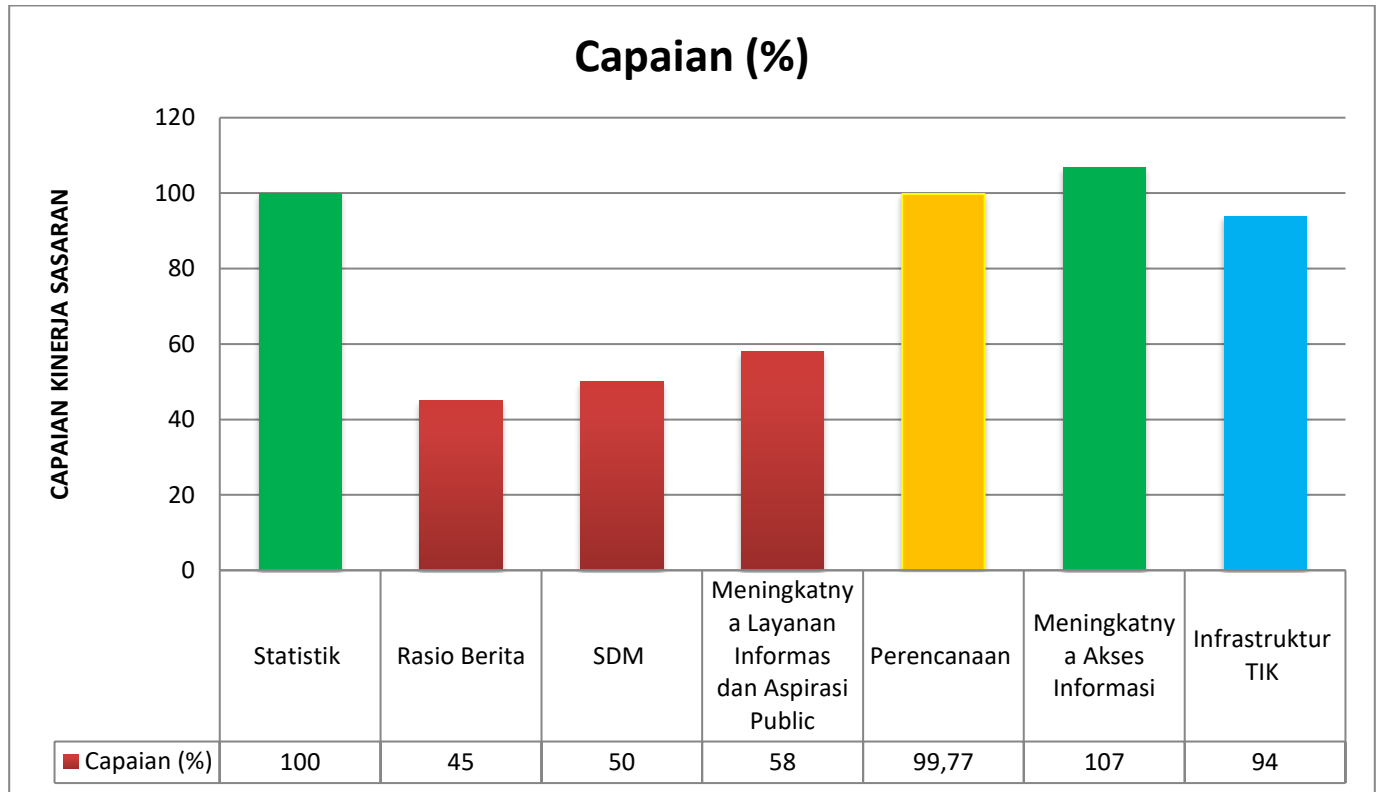
BAB 4 Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Capaian Kinerja, dari 7 sasaran strategis, nilai perangkat kinerjanya kategori sangat baik (sesuai kategori).
2. Grafik Capaian Sasaran Kinerja berdasarkan Skala Peringkat Kinerja, dapat ditampilkan sebagai berikut :

Grafik Capaian Kinerja Sasaran berdasarkan Pemenuhan Capaian Kinerja 100%





3. Berdasarkan pemenuhan capaian kinerja 100%, dari 7 sasaran strategis, terdapat 28,5% (2 sasaran) yang capaian kinerjanya 100%, dan 28,5% (2 sasaran) yang capaian kinerjanya 90-99%, dan 28,5% (2 sasaran) yang capaian antara 51-65%, dan 14,3% (1 sasaran) yang kinerjanya di bawah 51 %.

Adapun langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan melalui Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas jaringan komunikasi dan Informatika melalui penyediaan jaringan Fiber Optik, dan standarisasi data center.
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik melalui penyediaan konten informasi yang berkualitas
- c. Meningkatkan Ketersediaan data statistik yang terintegrasi melalui interoperabilitas data dan sistem
- d. Meningkatkan keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya melalui pemenuhan Standar Manajemen Pengamanan Informasi secara bertahap

- e. Meningkatkan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui monev secara berkala.

Pemalang, Februari 2023

Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG



JOKO NGATMO, SE,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680825 199303 1 004